

**PERAN PERBEKEL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK  
MASYARAKAT DI DESA PANGKUNPARUK KECAMATAN SERIRIT  
KABUPATEN BULELENG**

**Oleh : I Nyoman Sudiksa<sup>1</sup>, I Nyoman Mudarya<sup>2</sup> dan I Nyoman Suprapta<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Perbekel sebagai pemimpin dan kepala pemerintahan di desa berkewajiban untuk bisa berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam pembangunan di bidang politik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah peran perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Pangkungparuk ?; 2) bagaimanakah partisipasi politik masyarakat Desa Pangkungparuk ?; dan 3) faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Pangkungparuk ?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang peran perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Pangkungparuk. Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan tahapan : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa peran perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah sebagai motivator dan komunikator. Partisipasi politik masyarakat di Desa Pangkungparuk dapat dibagi menjadi 3 kategori yakni *apatis*, *spectator*, dan *gladiator*.

Faktor internal pendukung perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Pangkungparuk adalah adanya calon yang berasal dari satu desa saat pemilu. Faktor eksternal pendukungnya adalah adanya politik uang yang diberikan oleh calon kepada masyarakat pemilik suara. Sedangkan faktor internal penghambatnya adalah kualitas SDM masyarakat dan aparat desa. Faktor eksternal penghambatnya adalah stimulus dari pemerintah yang kurang, kapasitas dan kapabilitas pemimpin yang kurang memadai, serta kurangnya intensitas sosialisasi serta adanya pengaruh dari luar

**Kata kunci : komunikasi, motivasi, partisipasi politik.**

---

<sup>2</sup> Universitas Panji Sakti email. mudarya@unipas.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Panji Sakti email. nym.suprapta@unipas.ac.id

## 1. Pendahuluan

Pembangunan di desa adalah merupakan perpaduan kegiatan pemerintah dan masyarakat. Kegiatan pemerintah dilakukan melalui program-program sektoral dari berbagai kementerian dan lembaga non kementerian. Masyarakat hendaknya berperan dalam mendukung dan menyukseskan program-program yang dijalankan oleh pemerintah.

Dalam hubungan ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, pengarahan, pembinaan, dan bantuan dalam batas kemampuan yang tersedia disertai dengan pengawasan yang intensif. Partisipasi dalam pembangunan desa diwujudkan dalam bentuk prakarsa atau swadaya gotong royong masyarakat. Antara program sektoral harus dapat saling mengisi, harus ada saling berkaitan dan ketergantungan. Demikian pula antara program-program sektoral dengan kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan dengan prinsip-prinsip pembangunan desa adalah menyeluruh, terpadu, terkoordinir, dinamis, dan berkelanjutan (*sustained*) dengan memperhatikan adanya keseimbangan kewajiban yang serasi dengan kegiatan masyarakat (Tjokrowinoto, 2011 : 10).

Sasaran utama pembangunan desa adalah untuk mewujudkan desa-desa atau kelurahan di seluruh wilayah Republik Indonesia memiliki tingkat perkembangan dengan klasifikasi desa swasembada, yaitu desa-desa yang maju dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup serta kesejahteraan yang terus meningkat. Sehubungan dengan itu, Perbekel sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU No. 3/2024 tentang Desa)

Seorang pemimpin selain harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan harus memiliki kelebihan daya fisik, psikis, dan mental serta daya pikir yang luas. Hal senada diungkapkan oleh Sudirjo (2012 : 3) yaitu :

“kepemimpinan adalah suatu seni (*art*), kesanggupan (*ability*), atau teknik untuk membuat sekelompok orang (bawahan dalam organisasi formal atau para pengikut atau simpatisan dalam organisasi yang informal) mengikuti atau mentaati segala apa yang dikehendakinya, membuat mereka begitu antusias atau bersemangat untuk mengikutinya, bahkan ada yang sanggup berkorban”.

Jadi dalam setiap bidang pembangunan desa, Perbekel diharapkan mampu untuk memberikan motivasi dan berkomunikasi dengan baik dengan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan program pembangunan baik dari segi gotong royong ataupun dalam pengumpulan dana swadaya murni masyarakat untuk menopang dana pokok serta mampu memberdayakan segenap potensi yang ada di wilayah desa yang dipimpinnya.

Pembangunan nasional sebagai sebagai suatu proses dinamis menuju keadaan sosial yang lebih baik, atau yang lebih modern, jelas merupakan gejala sosial yang multi dimensi dan dapat didekati dari berbagai ilmu pengetahuan, seperti ekonomi pembangunan, pembangunan hukum, sosiologi pembangunan, pembangunan politik, teknologi pembangunan, administrasi pembangunan dan sebagainya. Pembangunan politik merupakan bagian dari pembangunan nasional, dimana pembangunan itu ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga terciptanya suatu ketertiban politik. Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di dalam negeri, tetapi dapat juga dipengaruhi oleh konstelasi politik internasional. Di samping itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis perlu didukung juga oleh penyelenggara negara yang profesional dan terbebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal segala sumber daya yang ada.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan politik di Indonesia adalah tingkat partisipasi politik masyarakat, artinya sejauh mana masyarakat terlibat secara langsung dalam proses politik. Keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak kepada kehidupan mereka di kemudian hari menjadi sangat penting diwujudkan sebagai esensi dari demokrasi. Pemilihan umum (pemilu) merupakan bentuk nyata dari demokrasi, dimana rakyat berpesta untuk memilih pemimpin sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya intimidasi dari

orang lain sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Bab II pasal 2 yang berbunyi ; Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Undang-undang telah menjamin hak-hak setiap warganegara termasuk dalam memilih pemimpin pada setiap pemilihan yang diselenggarakan, namun faktanya masih banyak orang yang enggan datang ke TPS untuk melakukan pemungutan suara dan kondisi ini terjadi bukan hanya di kota tetapi juga di desa-desa termasuk Desa Pangkungparuk dengan jumlah penduduk sekitar 7.212 jiwa memiliki Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum ( Pemilu ) Tahun 2024 sebanyak 5.650 orang, hanya 4.485 orang saja (79,38 %) yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 yang lalu dan sisanya 1.165 orang (20,62%) tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput). Fenomena golput terjadi pada setiap hajatan politik, baik pemilihan presiden, pemilihan legislative tingkat pusat dan tingkat daerah serta pemilihan gubernur, bupati atau walikota.

Perbekel sebagai pemimpin atau kepala pemerintahan di desa selama ini belum terlihat jelas perannya dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan sosialisasi dan motivasi politik, serta mengembangkan demokrasi. Ini tercermin dari tingginya angka golput dalam setiap hajatan politik. Seperti yang terjadi di Desa Pangkungparuk Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, menurut data yang diperoleh dari Petugas Pemungutan Suara (PPS) Desa Pangkungparuk khususnya pada hajatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Pemilihan Perbekel Tahun 2023, dan yang terakhir Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 14 Februari 2024 yang lalu, sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Prosentase Golput pada Pemilu di Desa Pangkungparuk**

NO	KEGIATAN/TH	DPT	HADIR		TDK HADIR	
			JML	%	JML	%
1	PEMILU 2019	5300	4380	82,64	920	17,36
2	PILKEL 2023	5614	4239	75,50	1375	24,50

3	PEMILU 2024	5650	4485	79,38	1165	20,62
---	-------------	------	------	-------	------	-------

Sumber : PPS Desa Pangkungparuk

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka golput masih sangat tinggi meskipun terjadi penurunan saat Pemilihan Perbekel tahun 2023 dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2024. Pada ajang Pemilihan Umum tahun 2019, dari total Daftar Pemilih Tetap sebesar 5.300 orang, yang menggunakan hak pilihnya hanya 4.389 orang atau 82,64% saja, sementara sisanya 920 orang atau 17,36% tidak memilih. Lalu kemudian pada Pemilihan Perbekel Desa Pangkungparuk yang diselenggarakan pada tahun 2023 total DPT sebanyak 5.614 orang, yang memilih sebanyak 4.239 orang atau 75,50 %, yang tidak memilih sebanyak 1.375 orang 24,50%. Yang terakhir Pemilihan Presiden dan Legislatif pada tahun 2024 kemarin dari jumlah DPT 5.650 orang, yang memilih sebanyak 4.485 orang atau 79,38% dan yang tidak memilih sebanyak 1.165 orang atau 20,62%. Secara umum memang ada penurunan jumlah golput namun harus diakui bahwa hal ini belum sesuai dengan harapan kita bersama dan perlu dilakukan upaya yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Merujuk kepada uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Perbekel dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Pangkungparuk Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah Partisipasi Politik masyarakat Desa Pangkungparuk Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Perbekel Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Pangkungparuk Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng?

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bungin (2015 : 32 ), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah

laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Sedangkan menurut Trianto (2013 : 179) penelitian kualitatif adalah penelitian yang percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini terutama adalah Perbekel dan Perangkat Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Pengurus Partai Politik, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat Desa Pangkungparuk Kecamatan Seririt. Informan tersebut ditunjuk secara *purposive* dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah. Penunjukkan informan tidak dibatasi, disesuaikan dengan tingkat kejenuhan data, dalam artian penunjukkan informan dihentikan ketika semua data dan informasi yang dibutuhkan sudah didapatkan.

Hal pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahapan penelitian kualitatif adalah menetapkan *research question* atau fokus penelitian ( Hendarso, 2011 : 170). Menurut Moleong (2007), fokus penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian, sehingga fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan pola pikir yang bersifat “*emercial induktif*” (kenyataan dan induktif) segalanya ditentukan dari data yang sebenarnya diperoleh di lapangan Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Peran Perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Pangkungparuk, yang meliputi : 1) sebagai motivator; 2) sebagai komunikator.
2. Partisipasi politik masyarakat di Desa Pangkungparuk, yang meliputi : *Apatis, Spectator, dan Gladiator.*
3. Faktor pendukung dan faktor penghambat peran perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Pangkungparuk, yang meliputi : faktor internal dan faktor eksternal

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pangkungparuk Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, dengan tujuan untuk mengetahui peran perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.. Lokasi ini dipilih karena secara geografis wilayah Desa Umeanyar mudah dijangkau, serta data-data yang

dibutuhkan dalam penelitian ini cukup tersedia. Selanjutnya pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi atau pengamatan, wawancara mendalam dan pemanfaatan dokumen. Sedangkan analisa datanya dilakukan dengan analisa data kualitatif, dimana analisis data memakai empat tahapan analisis data seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013), yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1 Peran Perbekel dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat**

Kepala desa atau di Bali disebut dengan Perbekel menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai seorang pemimpin, seorang Perbekel dituntut untuk berperan aktif dalam membangun Desa. Pada saat seseorang dapat melaksanakan kewajiban serta mendapatkan haknya maka orang tersebut sudah menjalankan peran.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, Perbekel Desa Pangkungparuk berperan sebagai motivator dan komunikator. Berikut hasil penelitian dan pembahasan terhadap peran Perbekel sebagai motivator dan komunikator tersebut.

##### **3.1.1 Peran Perbekel sebagai Motivator**

Secara umum, Pemerintah Desa Pangkungparuk sudah berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk berperan aktif dalam pembangunan politik.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, dapat diketahui bahwa Perbekel Desa Pangkungparuk bersama Perangkat Desa Pangkungparuk sudah berperan aktif dalam menyadarkan masyarakat agar mau menggunakan hak pilihnya dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan. terbukti Perbekel Desa Pangkungparuk selalu hadir ke TPS lebih awal untuk memotivasi masyarakatnya dan memberi contoh bagaimana menjadi warga negara yang baik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soekanto (2015 : 178-179) bahwa

kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan dari seseorang ( yaitu pemimpin atau *leader* ) untuk mempengaruhi orang lain ( yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya ), sehingga orang lain tersebut bertindak laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Sebagai seorang pemimpin, perbekel dibebani tugas dan tanggungjawab yang lebih berat dibandingkan dengan bawahannya. Seorang pemimpin dituntut agar dapat memenuhi suatu persyaratan dalam melaksanakan suatu kegiatan organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta (Sinambela, 2015 :114). Selanjutnya pemimpin mempunyai pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan bawahannya, berdedikasi baik, serta pengalaman yang luas. Oleh sebab itu pemimpin memiliki perilaku yang dapat diterima oleh bawahan dan lingkungannya. Pemimpin harus dapat memengaruhi perilaku bawahannya agar apa yang diperintahkannya senantiasa dapat dilaksanakan oleh bawahannya.

Dalam rangka upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat dibutuhkan sebuah strategi yang tepat agar usaha tersebut menjadi efektif. Langkah-langkah yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik masyarakatnya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari para informan dan pemeriksaan beberapa dokumen, dapat diketahui bahwa Perbekel Desa Pangkungparuk bersama jajarannya telah melakukan usaha berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat di Desa Pangkungparuk, hal ini dapat dilihat dari tindakan Perbekel Desa Pangkungparuk yang menggerakkan dan mengarahkan daya serta potensi masyarakat yang ditandai dengan pelibatan tokoh-tokoh masyarakat dan Kelian adat dalam kegiatan sosialisai tersebut. Ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rivai (2013 : 455) mengemukakan pengertian motivasi merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang memengaruhi untuk mencapai hasil yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Motivasi menekankan pada bagaimana menggerakkan dan mengarahkan daya serta potensi bawahan agar mau bekerjasama secara produktif sehingga berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan organisasi.

Tujuan menjadi kata kunci dalam motivasi, tanpa adanya tujuan yang jelas maka segala yang dilakukan menjadi sia-sia. Berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para informan, maka dapat dimengerti bahwa upaya-upaya

untuk mendorong dan merangsang masyarakat agar tidak golput dilakukan dengan cara mengedukasi mereka supaya memahami tujuan dari Pemilu tersebut, dan ini perlu dilakukan secara berkala dan materi yang disajikan lebih spesifik dan tidak membosankan. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mc.Donald dalam Sardiman ( 2014 : 74 ) motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yaitu tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan ini akan menyangkut soal kebutuhan. Sesuai juga dengan yang dikemukakan oleh Marifield dan Hamzah ( 2012 :76 ) kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama.

### **3.1.2 Peran Perbekel sebagai Komunikator**

Salah satu kelebihan dan keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kecakapan dalam berkomunikasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media dan menghasilkan efek. Perbekel sebagai pemimpin di desa dituntut supaya mampu berkomunikasi dengan baik dengan warganya sehingga apa yang menjadi tujuan bisa tercapai. Dalam konteks partisipasi politik, Perbekel Desa Pangkungparuk melakukan komunikasi secara intensif dengan masyarakat dan staf di Kantor Desa Pangkungparuk agar bisa meminimalisir angka golput.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan , maka dapat dipahami bahwa komunikasi dilakukan secara verbal melalui tatap muka secara langsung dan dialog dengan masyarakat guna menyamakan persepsi tentang pentingnya keterlibatan setiap warga negara dalam Pemilu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Effendi (2010 :82) Jika komunikasi dengan bahasa disebut dengan komunikasi Verbal ( *verbal communication* ). Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan menggunakan media dan menimbulkan efek, artinya selain komunikasi secara langsung dengan berbicara dan bertatap muka antara dua orang atau lebih, ada juga komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang informan dapat diketahui bahwa cara komunikasi yang dilakukan oleh Perbekel Desa Pangkungparuk. Selain menggunakan komunikasi verbal juga dilakukan komunikasi menggunakan media seperti tulisan, gambar dan media sosial. Ini bersesuaian dengan yang disampaikan oleh Effendi ( 2010 : 82) bahwa, selain menggunakan bahasa sebagai alat dalam proses komunikasi, pada kenyataan dan situasi tertentu digunakan juga lambang-lambang lain, diantaranya gerak isyarat (*gesture*) dengan salah satu anggota tubuh ( misalnya tangan, mata, bibir , dan lain-lain), gambar ( foto, film, lukisan, diagram dan sebagainya, warna dan lain sebagainya. Jika komunikasi dengan bahasa disebut dengan komunikasi Verbal ( *verbal communication* ),maka komunikasi dengan menggunakan lambang yang bukan bahasa dinamakan komunikasi non verbal ( *non verbal communication*). Selain melakukan komunikasi dengan warga, Pemimpin juga perlu melakukan komunikasi dengan stafnya berkaitan dengan perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan partisipasi politikarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat perlu dilakukan komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan maupun bawahan dengan bawahan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Effendi ( 2010 : 79 ) komunikasi dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu : Komunikasi Vertikal ( *Vertical Communication* ) yaitu komunikasi dari atas ke bawah ( *up word communication* ). Komunikasi Horizontal ( *Horizontal Communication* ), ini terjadi antara individu-individu dengan pegawai yang mempunyai status atau peringkat dalam struktur organisasi misalnya : komunikasi antar staf, komunikasi antar karyawan menengah. dan Komunikasi Cabang atau Diagonal ( *Crosswise Communication* ) merupakan kombinasi komunikasi vertical dengan komunikasi horizontal dan merupakan komunikasi individu atau karyawan yang berbeda pangkat atau status dan juga berbeda bagian atau departemen.

### **3.2 Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Pangkungparuk**

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya ( Surbakti, 2011 : 26 ). Partisipasi politik juga merupakan kegiatan-kegiatan sukarela

dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sehubungan dengan partisipasi politik masyarakat Desa Pangkungparuk, bahwa selama ini sebagian besar masyarakat Desa Pangkungparuk sudah melibatkan dirinya dalam setiap kegiatan politik khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan didukung dengan hasil pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu dijumpai orang-orang yang tidak mau terlibat dalam kegiatan politik. Mereka cuek dengan segala hiruk pikuknya perhelatan politik seperti saat pemilu. Orang-orang seperti ini oleh Milbart dan Goel ( Daulai,2013 : 175 ), disebut *Apatis*, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.

Selanjutnya dalam kehidupan politik masyarakat juga bisa ditemui orang-orang yang tidak begitu aktif dalam kegiatan politik tetapi orang tersebut minimal pernah hadir ke TPS saat ada pemilihan umum.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, dapat dipahami bahwa dalam masyarakat akan selalu ada warga yang tidak begitu aktif dalam kehidupan politik di desanya, tetapi orang ini bukan golput, karena sekali-sekali dia mau datang ke TPS untuk menyalurkan hak politiknya dalam pemilihan umum. Oleh Milbart dan Goel ( Daulai,2013 : 175 ) orang-orang seperti ini disebut *Spectator*, artinya orang yang setidaknya-tidaknyanya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.

Yang terakhir dari bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Desa Pangkungparuk adalah adanya orang-orang yang memang mau dan secara sadar terlibat aktif dalam proses politik. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, didukung hasil observasi di lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa dalam kehidupan dan proses politik di desa, terlebih saat ada perhelatan Pemilu, akan banyak dijumpai orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik tersebut, baik itu sebagai kader partai politik bahkan menjadi calon, ataupun sebagai tim sukses atau juru kampanye. Masyarakat yang seperti itu

oleh Milbart dan Goel ( Daulai, 2013 : 175 ), disebut *gladiator*, artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Budiarjo (2015 : 160), yang mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah ( *public policy* ).

### **3.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Perbekel Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Pangkungparuk**

Peran Perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat tentunya ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut bisa berupa faktor internal maupun faktor eksternal.

#### **3.3.1 Faktor Pendukung**

Keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan partisipasi politik masyarakat khususnya untuk mau terlibat aktif dalam setiap proses politik sangat ditentukan oleh adanya faktor dari dalam masyarakat yang dipimpinnya tersebut. Dalam hal faktor pendukung peran Perbekel Desa Pangkungparuk dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan didukung hasil observasi di lokasi penelitian terutama melihat situasi saat Pemilu pada 14 Pebruari 2024, dapat diketahui bahwa adanya caleg dari satu desa dan adanya harapan para caleg itu jika terpilih dapat merubah nasibnya serta meningkatkan pembangunan di desanya, menjadi faktor pendukung internal peran perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Pangkungparuk. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Turindra ( 2009 : 49 ) yang menyebutkan adanya tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting salah satunya adalah alasan ketiga yang mendorong partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka

sendiri. Hal ini selaras dengan konsep *man-cetered development* yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

Sedangkan faktor pendukung eksternal dari peran perbikel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Pangkungparuk adalah salah satunya adanya *money politic* seperti adanya pembagian sembako atau uang tunai kepada masyarakat supaya mau memilih calon tertentu.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang informan, dapat dipahami bahwa adanya bantuan yang diberikan oleh calon tertentu menjadi pendukung eksternal partisipasi politik masyarakat khususnya untuk mau datang ke TPS saat Pemilu. Dengan bantuan yang didapatkan atas suara yang diberikan, masyarakat juga merasa dihargai secara politik karena suaranya akan menentukan terpilih tidaknya seorang calon. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Milbrath (Damsar, 2015 : 23), yang mengatakan bahwa partisipasi politik memiliki empat faktor, yang salah satunya adalah rangsangan politik yang didapat seseorang bisa memicu partisipasinya dalam berpolitik.

### **3.3.2 Faktor Penghambat**

Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak normal, maka perlu dilakukan suatu usaha untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat perbikel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui faktor internal yang menghambat Perbikel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yakni Pendidikan yang rendah kemudian jenis pekerjaan yang tidak tetap, penghasilan minim dan usia remaja dan lansia. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sunarti (2016 : 114) faktor internal yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat adalah : umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan penghasilan.

Selain faktor internal seperti yang sudah diuraikan diatas terdapat juga faktor eksternal. Dimana berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat diketahui faktor eksternal yang menghambat Perbikel Desa Pangkungparuk dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yakni intensitas sosialisai dari

pemerintah yang masih rendah, karena sosialisasi yang aktif dari pemerintah akan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, kemudian minimnya stimulus dari pemerintah, dan adanya pengaruh masyarakat dari luar juga bisa menghambat tingkat partisipasi politik masyarakat serta topografi desa yang tidak mudah dijangkau akan berkontribusi menghambat tingkat partisipasi masyarakat di Desa Pangkungparuk. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sunarti (2016 : 115) faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah intensitas sosialisasi, stimulus dari pemerintah atau pihak luar, keaktifan fasilitator dan pengaruh masyarakat dari luar.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peran Perbekel sebagai motivator dan komunikator dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Desa Pangkungparuk meliputi tindakan memberi contoh dan tauladan yang baik bagi masyarakat, menggerakkan dan mengarahkan daya serta potensi masyarakat, memberikan rangsangan dan dorongan kepada masyarakat, penyampaian informasi yang terpercaya, membuka ruang dialog dengan masyarakat. ini bertujuan untuk menekan angka golput di Desa Pangkungparuk yang masih tinggi.
2. Partisipasi politik masyarakat di Desa Pangkungparuk, dapat dilihat dari beberapa kategori, pertama yakni *Apatis*, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, *spectator*, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Dan yang ketiga, *gladiator*, artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik dengan menjadi tim sukses ataupun pekerja kampanye atau juru kampanye salah seorang calon.
3. Faktor internal pendukung perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah adanya calon yang berasal dari satu desa. Sedangkan faktor eksternal pendukung perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik

adalah adanya *money politic* yakni pemberian bantuan kepada warga supaya mau memilih calon tertentu. Faktor internal penghambat Perbekel dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yakni kualitas SDM Pemerintah Desa dan masyarakatnya, tingkat pendidikan yang rendah, penghasilan sedikit dan tidak tetap serta usia remaja dan lansia. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi stimulus dari pemerintah, kapasitas dan kapabilitas pemimpin yang kurang memadai, serta kurangnya intensitas sosialisasi serta adanya pengaruh masyarakat dari luar.

#### **4.2 Saran-Saran**

Mengacu pada simpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran berikut ini :

1. Peran Perbekel sebagai motivator dan komunikator dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat hendaknya didukung oleh sumberdaya yang mumpuni dan melibatkan elmen penting seperti kaum intelektual dan tokoh-tokoh masyarakat.
2. Perbekel mestinya berusaha merubah pola komunikasi dan sosialisasi yang selama ini dirasa kaku dan monoton, harus dicari pola yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang akan dilibatkan sehingga pesan yang disampaikan bisa dimengerti dan dilaksanakan dengan baik dengan demikian apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai.
3. Adanya regulasi baru yang mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dimana memilih pemimpin bukan hanya merupakan hak tapi harus dijadikan sebagai kewajiban setiap warga negara. Perbekel juga harus bisa mencegah terjadinya politik uang dan politik transaksional supaya alam demokrasi yang baik bisa tetap terjaga.

#### **Daftar Pustaka**

Bungin, Burhan, 2015, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis keArah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta.

- Budiarjo, Miriam, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Damsar, 2015, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta
- Daulay, Khairatun Uma, 2013, *Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula*, Universitas Sumatera Utara.
- Effendy, Onong Uchjana, 2010, *Human Relations dan Public Relations*, Mandar Maju : Bandung
- Hendarso, Emy Susanti, 2011, *Metode Penelitian sosial, Berbagai alternative Pendekatan Dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed) Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Sardiman, A.M. 2014. *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Sinambela, Lijan Poltak, 2015, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, PT. Bumi Aksara : Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Universitas Indonesia : Jakarta
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta : Bandung.
- Sunarti, Euis, 2016, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat*, Angkasa : Bandung
- Surbakti, Ramlan, 2011, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiarsana Indonesia : Jakarta.
- Trianto, 20013, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Kencana : Jakarta
- Turindra, Azis, 2009, *Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa*, Universitas Negeri Semarang.
- Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu